

ANALISIS PENGARUH *TAX RATIO* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DI INDONESIA

Donata Elfira Bikolo
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Rizal R Manullang

Akuntansi Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstrak – Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diukur menggunakan indeks *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tersusun atas enam indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, tingkat kemiskinan, koefisien Gini, tingkat pengangguran, akses terhadap air minum layak, dan sanitasi layak. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan sampel sebanyak 25 provinsi dan 100 observasi. Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model yang paling sesuai digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax ratio* memiliki hubungan positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pemerintah. Alokasi belanja pemerintah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, *tax ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui alokasi belanja pemerintah sebagai variabel mediasi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum tentu diikuti oleh perbaikan kualitas belanja maupun pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tax Ratio*, Alokasi Belanja Pemerintah, SDGs, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Regresi Data Panel, *Path Analysis*.

Abstract – Sustainable economic growth is measured using the *Sustainable Development Goals* (SDGs) index, which is composed of six indicators: GRDP growth, poverty rate, Gini coefficient, unemployment rate, access to clean drinking water, and proper sanitation. Research data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance through the Regional Financial Information System (SIKD) with a sample of 25 provinces and 100 observations. The Hausman test results indicate that the most appropriate model is the *Random Effects Model* (REM). The results indicate that the *tax ratio* has a positive but insignificant relationship with government spending allocation. Government spending allocation also has no significant effect on sustainable economic growth. Furthermore, the *tax ratio* has no significant effect on sustainable economic growth, either directly or indirectly

through government spending allocation as a mediating variable. These findings indicate that increasing fiscal capacity is not necessarily followed by improvements in spending quality or the achievement of sustainable development.

Keywords: *Tax Ratio*, Government Spending Allocation, SDGs, Sustainable Economic Growth, Panel Data Regression, Path Analysis.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi salah satu indikator utama untuk menilai tingkat perkembangan suatu negara, termasuk Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) selama ini digunakan sebagai ukuran utama kinerja ekonomi karena menggambarkan total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Produk Domestik Bruto tahun 2024, PDB merupakan indikator makroekonomi yang paling umum dipakai untuk melihat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berguna untuk membandingkan kinerja ekonomi dari waktu ke waktu maupun antarnegara, PDB juga sering dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi, termasuk perencanaan pembangunan nasional, perpajakan, serta pengeluaran negara.

Secara umum, PDB mencakup seluruh nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, transportasi, manufaktur, pertanian, dan jasa. PDB dapat dihitung melalui pendekatan pengeluaran yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi atau pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto. Walaupun PDB mampu menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi, indikator ini lebih menekankan pada kuantitas output sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan aspek keberlanjutan.

Dalam kajian ekonomi pembangunan, penggunaan PDB sebagai satu-satunya ukuran pertumbuhan semakin banyak dikritik karena dianggap belum mampu menggambarkan kualitas pembangunan secara menyeluruh, terutama dari sisi sosial dan lingkungan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa

peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan PDB. Pandangan serupa juga disampaikan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya menitikberatkan pada peningkatan output berisiko mengabaikan pembangunan manusia dan keberlanjutan. Dengan demikian, kenaikan PDB tidak selalu berarti tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF), PDB nominal Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada periode 2021–2025. Pada tahun 2021, PDB nominal Indonesia tercatat sekitar USD 1,19 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7%. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar USD 1,32 triliun pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,3%, lalu naik lagi menjadi sekitar USD 1,37 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 5,0%. Pada tahun 2024, PDB nominal Indonesia mencapai sekitar USD 1,40 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0%, dan pada tahun 2025 diproyeksikan naik menjadi sekitar USD 1,44 triliun dengan pertumbuhan 4,9%. Secara angka, kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang cukup baik setelah pandemi.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas pertumbuhan belum mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari koefisien Gini Indonesia sebesar 0,379 pada Maret 2024 dan meningkat menjadi 0,381 pada September 2024. Nilai tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan sedang hingga tinggi, sehingga distribusi konsumsi rumah tangga belum merata dan kelompok berpendapatan rendah belum memperoleh manfaat yang seimbang dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, struktur ketenagakerjaan juga masih menghadapi tantangan, karena sekitar 59,4% angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal pada awal 2025. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan produktivitas rendah, pendapatan yang tidak stabil, dan minimnya perlindungan sosial. Di samping itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 tercatat sekitar 4,85% atau sekitar 7,46 juta orang, yang menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum terserap secara optimal dalam pasar kerja formal. Dari sisi lingkungan, Indonesia juga masih menghadapi tantangan berupa krisis sampah rumah tangga sebesar 60,40% serta alih fungsi sekitar 200.000 hektare hutan untuk kegiatan pertambangan. Dengan kondisi tersebut, jelas bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, sedangkan ekonomi berkelanjutan menuntut kualitas pembangunan yang lebih menyeluruh.

Di sisi lain, kemampuan negara dalam mendorong pembangunan sangat bergantung pada kapasitas fiskal. Salah satu ukuran penting kapasitas fiskal adalah *tax ratio*, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *tax ratio* Indonesia selama periode 2021–2025 berada pada kisaran 9–10%. Pada tahun 2021 *tax ratio* tercatat sekitar 9,1%, kemudian naik menjadi sekitar 10,3% pada tahun 2022–2023, tetapi kembali stagnan di sekitar 10% pada tahun 2024–2025.

Permasalahan utama *tax ratio* adalah tingkatnya yang masih relatif rendah dan tidak mengalami peningkatan yang berarti meskipun perekonomian tumbuh stabil. Secara ideal, kenaikan PDB seharusnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara proporsional. Akan tetapi, dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi di atas 5% tidak diiringi oleh kenaikan *tax ratio* yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam optimalisasi penerimaan pajak, baik dari sisi kepatuhan, perluasan basis pajak, maupun efisiensi administrasi. Basis pajak orang pribadi di Indonesia juga tergolong sempit karena batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diperkirakan mencapai sekitar 69% dari rata-rata penghasilan per kapita. Kondisi ini mengurangi kontribusi pajak individu terhadap total penerimaan. Selain itu, dominasi sektor informal menjadi faktor penting yang menyebabkan basis pajak sulit diperluas, mengingat sekitar 59% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal yang sulit dijangkau sistem perpajakan. Akibatnya, potensi penerimaan pajak tidak dapat terealisasi secara optimal. Hal ini turut tercermin dari rendahnya rasio wajib pajak terhadap jumlah pekerja, di mana jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT hanya sekitar 17,67 juta dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja pada 2025, atau sekitar 12,12%.

Keterbatasan *tax ratio* berdampak langsung pada ruang fiskal pemerintah. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga ketika *tax ratio* stagnan, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja juga menjadi terbatas. Di sinilah muncul persoalan pada alokasi belanja pemerintah. Secara ideal, belanja pemerintah berperan sebagai instrumen strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur hijau, perlindungan sosial, dan sektor lingkungan. Namun dalam praktiknya, struktur belanja pemerintah Indonesia masih banyak terserap pada belanja rutin dan kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2024, realisasi belanja negara Indonesia mencapai Rp3.350,3 triliun atau sekitar 100,8% dari target APBN, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun. Meskipun realisasi ini tinggi, pengeluaran rutin masih mendominasi, terutama belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan kewajiban sosial lainnya. Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi investasi produktif jangka panjang masih relatif kecil dibandingkan belanja rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum tentu langsung diterjemahkan menjadi belanja yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

World Commission on Environment and Development (WCED) mendefinisikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai pertumbuhan ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi berfokus pada pertumbuhan yang efisien dan stabil serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Pilar sosial menekankan pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, peningkatan

kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan. Sementara itu, pilar lingkungan menekankan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, pengurangan pencemaran, dan pelestarian ekosistem agar daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Dalam implementasinya, pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan dan strategi yang mampu menjaga keseimbangan ketiga pilar tersebut. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya secara efisien, investasi pada teknologi ramah lingkungan, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta penciptaan sistem ekonomi yang inklusif dan adil. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan pada masa kini, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan maupun kesejahteraan sosial.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara penerimaan pajak, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Alya Fauzi Zaizafun et al. (2023) menelaah pengaruh penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, namun masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional tanpa mempertimbangkan dimensi keberlanjutan. Studi Meliza Meliza dan Akhmad Samsul Ulum (2025) juga meneliti tax revenue dan pengeluaran pemerintah tingkat kabupaten/kota terhadap pertumbuhan inklusif, tetapi belum menjelaskan secara menyeluruh bagaimana *tax ratio* memengaruhi pembangunan berkelanjutan. Penelitian Suparna Wijaya et al. (2025) membahas kondisi dan determinan *tax ratio* di Indonesia, tetapi belum mengaitkannya dengan mekanisme alokasi belanja pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh Image Intan Marselina Da Lopez et al. (2026) menyoroti peran pajak dalam mendanai infrastruktur, namun masih menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi secara umum.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara empiris mengkaji hubungan antara *tax ratio*, alokasi belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks periode 2021–2024. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan bukti empiris mengenai peran *tax ratio* serta alokasi belanja pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *tax ratio* terhadap alokasi belanja pemerintah di Indonesia periode 2021–2024.
2. Menganalisis pengaruh alokasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia periode 2021–2024.
3. Menganalisis pengaruh *tax ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui alokasi belanja pemerintah sebagai variabel mediasi di Indonesia periode 2021–2025

II. LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pembiayaan negara dan fungsi mengatur sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan aktivitas ekonomi dan sosial.

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pembiayaan negara dan fungsi mengatur sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan aktivitas ekonomi dan sosial.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini menjadi dasar utama dalam administrasi perpajakan modern karena menuntut partisipasi aktif wajib pajak sekaligus pengawasan dari otoritas pajak.

Tax ratio

Tax ratio adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode tertentu. Rasio ini mencerminkan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan pajak dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Semakin tinggi *tax ratio*, semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai belanja publik dan pembangunan nasional.

Secara teoritis, *tax ratio* berkaitan dengan fungsi pajak dalam keuangan publik, teori ability to pay, benefit principle, serta konsep tax buoyancy dan tax elasticity. *Tax ratio* yang rendah menunjukkan bahwa potensi ekonomi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi penerimaan negara. Sebaliknya, *tax ratio* yang meningkat menggambarkan sistem perpajakan yang lebih efektif, basis pajak yang lebih luas, dan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto merupakan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu. PDB digunakan sebagai indikator utama untuk menilai aktivitas dan kinerja ekonomi. PDB terdiri dari dua bentuk, yaitu PDB nominal yang dihitung berdasarkan harga berlaku, dan PDB riil yang dihitung berdasarkan harga konstan sehingga lebih mencerminkan pertumbuhan riil tanpa dipengaruhi inflasi.

PDB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran, PDB dirumuskan sebagai konsumsi rumah tangga ditambah investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Secara teori, PDB dijelaskan melalui teori pendapatan nasional, teori nilai tambah, dan teori barang akhir. Namun, PDB juga memiliki keterbatasan karena belum mampu menggambarkan distribusi pendapatan,

kualitas lingkungan, pekerjaan informal, dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ukuran yang umum digunakan adalah persentase perubahan PDB riil. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan output nasional dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan.

Teori pertumbuhan ekonomi berkembang dari teori klasik, teori neoklasik, hingga teori pertumbuhan endogen. Teori klasik menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi. Teori neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menegaskan bahwa inovasi, pendidikan, dan investasi sumber daya manusia merupakan faktor internal yang mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya dilihat dari peningkatan *output*, tetapi juga dari pemerataan manfaat dan keberlanjutan sumber daya.

Prinsip *triple bottom line* menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan tiga aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Teori yang mendukung konsep ini antara lain teori legitimasi, teori regulasi, teori institusional, teori keagenan, dan teori pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diukur melalui indikator SDGs (Sustainable Development Goals) yang mencakup pertumbuhan PDRB, kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, akses air minum layak, dan sanitasi layak.

Alokasi Belanja Pemerintah

Alokasi belanja pemerintah merupakan cara pemerintah membagikan anggaran ke berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan lingkungan. Belanja pemerintah berperan penting dalam menyediakan barang publik, mengurangi kegagalan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kualitas alokasi belanja sangat menentukan efektivitas kebijakan fiskal.

Menurut teori keuangan publik, belanja pemerintah memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Teori Keynesian juga menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat mendorong permintaan agregat dan meningkatkan output nasional. Selain itu, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa belanja produktif pada sektor strategis dapat memperkuat pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, alokasi belanja pemerintah dapat menjadi penghubung penting antara *tax ratio* dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat nonlapangan dan mencakup wilayah Indonesia secara nasional. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Periode penelitian mencakup empat tahun, yaitu 2021–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada ketersediaan data terbaru serta untuk menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Seluruh proses penelitian meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan antarvariabel secara objektif berdasarkan data numerik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian pengaruh *tax ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui alokasi belanja pemerintah sebagai variabel mediasi. Dengan metode kuantitatif, hasil penelitian dapat dianalisis secara statistik sehingga memberikan kesimpulan yang lebih terukur dan sistematis.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dan analisis jalur. Regresi data panel digunakan karena data yang diteliti merupakan gabungan antara data lintas provinsi dan runtut waktu selama periode 2021–2024. Sementara itu, analisis jalur digunakan untuk menilai pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel dalam model penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme hubungan antarvariabel yang diteliti.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 provinsi. Populasi tersebut dipilih karena setiap provinsi memiliki karakteristik fiskal dan pembangunan yang dapat dianalisis dalam kaitannya dengan *tax ratio*, alokasi belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: provinsi yang memiliki data lengkap selama periode 2021–2024, tersedianya data untuk seluruh variabel penelitian, serta data yang konsisten dan dapat diperbandingkan antarperiode. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 25 provinsi sebagai sampel penelitian dengan total 100 observasi, yang terdiri atas 25 provinsi dikalikan 4 tahun pengamatan.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax ratio*. Variabel ini menggambarkan kemampuan fiskal daerah dalam menghimpun penerimaan pajak dibandingkan dengan kapasitas ekonominya. *Tax ratio* mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi daerah mampu dikonversi menjadi penerimaan pajak.

Variabel mediasi adalah alokasi belanja pemerintah. Variabel ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membelanjakan sumber daya fiskalnya pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan, seperti belanja modal dan pengeluaran produktif lainnya. Alokasi belanja digunakan untuk melihat apakah penerimaan pajak dapat diterjemahkan menjadi belanja yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang diproksikan melalui indeks *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indeks ini dipilih karena mencerminkan pembangunan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Indeks SDGs dalam penelitian ini dibangun dari enam indikator, yaitu laju pertumbuhan PDRB, tingkat kemiskinan, koefisien Gini, tingkat pengangguran, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Untuk menyamakan skala pengukuran, seluruh indikator dinormalisasi menggunakan metode min-max. Setelah itu, masing-masing dimensi diberi bobot, yaitu 40% untuk dimensi ekonomi, 35% untuk dimensi sosial, dan 25% untuk dimensi lingkungan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi lembaga pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dari BPS digunakan untuk memperoleh informasi mengenai PDRB dan indikator SDGs, sedangkan data dari Kementerian Keuangan melalui SIKD digunakan untuk memperoleh data penerimaan pajak daerah dan alokasi belanja pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengunduh, mencatat, dan mengolah data dari laporan tahunan, publikasi statistik, serta basis data resmi yang tersedia pada situs lembaga terkait. Data yang terkumpul kemudian diseleksi sesuai kebutuhan penelitian berdasarkan periode 2021–2024. Selanjutnya, data disusun dalam bentuk data panel yang menggabungkan unsur lintas provinsi dan runtut waktu agar dapat dianalisis secara statistik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh hasil yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap awal dimulai dengan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi pada variabel *tax ratio*, alokasi belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria estimasi yang baik. Pengujian ini meliputi uji normalitas untuk melihat distribusi residual, uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan

yang terlalu kuat antarvariabel independen, serta uji heteroskedastisitas untuk memastikan kesamaan varians residual.

Setelah itu, dilakukan pemilihan model regresi data panel yang paling sesuai, yaitu antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Tahap ini penting karena data penelitian merupakan gabungan antara data lintas wilayah dan runtut waktu.

Model yang terpilih kemudian digunakan dalam analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh *tax ratio* terhadap alokasi belanja pemerintah, serta pengaruh *tax ratio* dan alokasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hasil regresi ini selanjutnya dianalisis menggunakan path analysis untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel, khususnya peran alokasi belanja pemerintah sebagai variabel mediasi.

Tahap berikutnya adalah uji koefisien determinasi untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin besar pula daya jelas model terhadap variabel yang diteliti.

Terakhir, dilakukan uji parsial atau uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh *tax ratio* terhadap alokasi belanja pemerintah, serta pengaruh *tax ratio* dan alokasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

IV. PEMBAHASAN

Pemilihan Model Panel

Penentuan model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman.

Tabel 1
Hasil Uji Chow

<i>Redundant Fixed Effects Tests</i>			
<i>Equation: Untitled</i>			
<i>Test cross-section fixed effects</i>			
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	8.328642	(24,73)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	131.859986	24	0.0000

Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas pada Cross-section F dan Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) dinyatakan lebih baik dibandingkan Common Effect Model (CEM). Hasil ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik antarprovinsi yang memengaruhi hubungan antarvariabel.

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

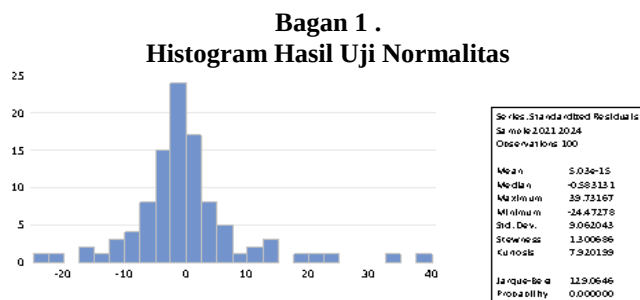
<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i>				
<i>Equation: Untitled</i>				
<i>Test cross-section random effects</i>				
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq d.f.</i>	<i>Prob.</i>	
<i>Cross-section random</i>	4.495229	2		0.1057

Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,1057 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan *Random Effect Model* (REM) dinyatakan lebih tepat dibandingkan FEM. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan karena pemilihan model telah cukup ditentukan melalui uji Chow dan uji Hausman.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi panel, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model.



Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual model *Random Effect Model* (REM) belum berdistribusi normal secara sempurna dengan nilai Jarque-Bera sebesar 129,0646 dan probabilitas 0,000000. Namun, kondisi tersebut masih dapat diterima karena regresi data panel dengan jumlah observasi yang cukup besar tidak menjadikan normalitas residual sebagai asumsi utama selama model telah memenuhi pengujian lainnya.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

	X	Z
X	1	0.06744549205440744
Z	0.06744549205440744	1

Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antara variabel *tax ratio* dan alokasi belanja pemerintah sebesar 0,0674. Nilai tersebut berada di bawah batas 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABSRES
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/07/26 Time: 09:38
Sample: 2021 2024
Periods included: 4
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 100
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.968364	3.030332	0.319557	0.7500
X	2.890164	1.611816	1.793110	0.0761
Z	0.048295	0.143461	0.336645	0.7371

Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa variabel *tax ratio* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0761 dan alokasi belanja pemerintah sebesar 0,7371. Kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga model penelitian dinyatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, model *Random Effect Model* (REM) layak digunakan untuk analisis regresi panel dan pengujian hubungan antar variabel penelitian.

Regresi Data Panel

Hasil regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM) dilakukan melalui dua persamaan.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Panel Persamaan I

Dependent Variable: Z
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/07/26 Time: 10:15
Sample: 2021 2024
Periods included: 4
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 100
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.78875	2.020663	6.328986	0.0000
X	0.732293	1.310636	0.558731	0.5776

Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Persamaan pertama menguji pengaruh *tax ratio* terhadap alokasi belanja pemerintah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa *tax ratio* memiliki koefisien positif sebesar 0,7323 dengan nilai probabilitas 0,5776. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *tax ratio* cenderung meningkatkan alokasi belanja pemerintah, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penerimaan pajak belum menjadi faktor utama yang menentukan perubahan alokasi belanja pemerintah karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti transfer pemerintah pusat, kebijakan fiskal daerah, dan prioritas pembangunan.

Tabel 7
Hasil Regresi Panel Persamaan II

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/07/26 Time: 10:25
Sample: 2021 2024
Periods included: 4
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 100
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.75090	3.638334	14.22379	0.0000
X	-2.206033	1.895535	-1.163805	0.2474
Z	-0.068636	0.179905	-0.381513	0.7037

Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Persamaan kedua menguji pengaruh *tax ratio* dan alokasi belanja pemerintah terhadap indeks SDGs sebagai proksi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax ratio* memiliki koefisien negatif sebesar -2,2060 dengan probabilitas 0,2474, sedangkan alokasi belanja memiliki koefisien negatif sebesar -0,0686 dengan probabilitas 0,7037. Kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks SDGs. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dan belanja pemerintah belum secara langsung mampu meningkatkan pembangunan berkelanjutan daerah. Pencapaian SDGs juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti efektivitas penggunaan anggaran, kualitas kebijakan pembangunan, kondisi sosial ekonomi, investasi, dan infrastruktur.

Uji t (parsial)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *tax ratio* pada persamaan pertama memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5776 ($>0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pemerintah. Pada persamaan kedua, *tax ratio* memiliki probabilitas sebesar 0,2474 dan alokasi belanja memiliki probabilitas sebesar 0,7037. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga *tax ratio* dan alokasi belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks SDGs. Dengan demikian, seluruh variabel independen dalam penelitian ini belum menunjukkan pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Weighted Statistics</i>			
<i>R-squared</i>	0.016465	<i>Mean dependent var</i>	47.70535
<i>Adjusted R-squared</i>	-0.003814	<i>S.D. dependent var</i>	9.137581
<i>S.E. of regression</i>	9.154989	<i>Sum squared resid</i>	8129.941
<i>F-statistic</i>	0.811931	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.768751
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.446994		
<i>Unweighted Statistics</i>			
<i>R-squared</i>	0.016465	<i>Mean dependent var</i>	47.70535
<i>Sum squared resid</i>	8129.941	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.768751

Sumber: Data Sekunder (Data diolah, 2026)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar -0,003814. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel *tax ratio* dan alokasi belanja pemerintah memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variasi indeks SDGs. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pembangunan berkelanjutan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas kebijakan,

efektivitas anggaran, investasi, kondisi sosial ekonomi, dan infrastruktur.

Path Analysis

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung *tax ratio* terhadap SDGs memiliki koefisien sebesar -2,2060. Sementara itu, pengaruh tidak langsung *tax ratio* terhadap SDGs melalui alokasi belanja pemerintah diperoleh dari perkalian koefisien $X \rightarrow Z$ dan $Z \rightarrow Y$, yaitu $0,7323 \times (-0,0686)$ sebesar -0,0503. Dengan demikian, total pengaruh *tax ratio* terhadap SDGs sebesar -2,2563.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah belum mampu memediasi hubungan antara *tax ratio* dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, seluruh hubungan antarvariabel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik.

Interpretasi Hubungan Antar variabel

Hasil analisis menunjukkan bahwa *tax ratio* memiliki hubungan positif terhadap alokasi belanja pemerintah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum secara langsung menentukan peningkatan belanja pemerintah karena pengelolaan anggaran daerah juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti transfer pemerintah pusat dan kebijakan fiskal daerah.

Selain itu, *tax ratio* dan alokasi belanja pemerintah memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap indeks SDGs. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak maupun belanja pemerintah belum mampu secara langsung mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan anggaran, kualitas kebijakan pembangunan, serta faktor sosial ekonomi dan infrastruktur daerah.

Hasil *path analysis* juga menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah belum mampu memediasi hubungan antara *tax ratio* dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal, tetapi juga memerlukan pengelolaan anggaran yang efektif serta dukungan berbagai faktor pembangunan lainnya.

Temuan – Temuan dalam Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi panel dan *path analysis*, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. *Tax ratio* memiliki hubungan positif terhadap alokasi belanja pemerintah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum secara langsung meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah.
2. *Tax ratio* menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap indeks SDGs. Artinya, peningkatan penerimaan pajak belum secara otomatis mendorong peningkatan pembangunan berkelanjutan.
3. Alokasi belanja pemerintah juga memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap SDGs, yang menunjukkan bahwa besarnya belanja belum menjamin peningkatan capaian pembangunan berkelanjutan tanpa pengelolaan anggaran yang efektif.

- Hasil *path analysis* menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah belum mampu memediasi hubungan antara *tax ratio* dan SDGs secara signifikan karena pengaruh tidak langsung yang dihasilkan relatif kecil.
- Pembangunan berkelanjutan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas kebijakan, efektivitas anggaran, investasi, kondisi sosial ekonomi, dan infrastruktur.
- Ditemukan adanya fenomena hubungan negatif antara *tax ratio* dan alokasi belanja terhadap SDGs, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji faktor-faktor lain pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum cukup untuk mendorong pembangunan berkelanjutan tanpa didukung oleh perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan *path analysis*, dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* memiliki hubungan positif terhadap alokasi belanja pemerintah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penerimaan pajak belum secara langsung menentukan perubahan alokasi belanja karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti transfer pemerintah pusat dan kebijakan fiskal daerah.

Alokasi belanja pemerintah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang diprosikan melalui indeks SDGs. Selain itu, *tax ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap SDGs baik secara langsung maupun melalui alokasi belanja pemerintah sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, alokasi belanja pemerintah belum mampu menjadi mediator dalam hubungan antara *tax ratio* dan pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal dan belanja pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti efektivitas anggaran, kualitas kebijakan pembangunan, investasi, kondisi sosial ekonomi, dan infrastruktur.

Saran

- Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan agar alokasi anggaran lebih efektif dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.
- Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memperbaiki kualitas pengelolaan belanja agar lebih tepat sasaran, terutama pada sektor yang mendukung pencapaian SDGs.
- Penyediaan data pembangunan berkelanjutan perlu terus ditingkatkan agar lebih lengkap dan konsisten, sehingga dapat mendukung evaluasi kebijakan serta penelitian terkait pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Bruto Indonesia menurut pengeluaran dan lapangan usaha*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia." (2025). <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. "Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2020–2024." (2024). <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia." (2024). <https://www.bps.go.id>
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- International Monetary Fund. "World Economic Outlook Database." (2025). <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2025/April>
- Jurnal Ilmiah MEA. (2024). Peran PDB sebagai indikator kinerja ekonomi. <https://journal.stiemb.ac.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2024." (2024). <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- OCBC NISP. (2023). *Pengertian pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya*. <https://www.ocbcnisp.com>
- Sekianti, R., & Nuraini, L. (2025). Tax revenue and economic growth in developing countries: A narrative synthesis of empirical evidence. *International Journal of Economics and Development Studies*, 14(1), 45–62.
- Simon Kuznets. (1941). *National income and its composition, 1919–1938*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Stern, D. I. (2004). *The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve*. World Development.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.